

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENGENAI LARANGAN MUDIK 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MEDIA *ONLINE* KOMPAS.COM DAN TEMPO.CO

Marsefio S Luhukay, S.Sos., M.Si
marsefio.luhukay@uph.edu

“Publik, netizen, warganet tidaklah pasif namun semakin kritis dalam melihat kinerja dan tanggung jawab organisasi. Karena itu media online dituntut makin proaktif dalam berkomunikasi dengan publik.”

Pada tahun 2020 lalu, dunia dilanda wabah virus yang begitu mengkhawatirkan. Secara resmi, negara China melaporkan kemunculan virus ini kepada WHO (World Health Organization) pada tanggal 31 Desember 2019 (BBC News Indonesia, 2020). Virus ini bernama Coronavirus atau yang biasa lebih dikenal sebagai virus Covid-19. Manusia yang terinfeksi virus ini biasanya memiliki tiga gejala umum seperti demam, batuk kering dan sesak napas. Bahkan secara global, Coronavirus telah banyak mengakibatkan kematian. Data mencatat bahwa mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang usia produktif, sampai dengan orang lanjut usia dapat terserang virus mematikan ini.

Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada hari Senin (2/3/2020). Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari, dengan berbagai varian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi memberikan nama baru untuk varian virus corona. Saat ini, diketahui ada 10 varian virus yang resmi menyandang nama yang diambil dari alfabet Yunani, dari Alpha, Beta, Delta hingga Gamma (Kompas.com,) Virus corona terus bermutasi sejak pandemi penyakit ini mulai. Varian-varian virus corona ini pun mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengonfirmasi adanya tiga varian baru virus corona yang telah masuk ke Indonesia. Ketiganya di antaranya berasal dari Inggris yang disebut varian B.1.1.7, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian Covid-19 India yang dikenal sebagai B.1.617. Mutasi virus corona SARS-CoV-19 telah diketahui sejak pertengahan tahun 2020. Di tengah wabah semakin banyak menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia

Kasus positif Covid di bulan ini terus mencetak rekor baru. Angkanya semakin tinggi. Begitu pula dengan angka pasien meninggal. Jumlah pasien sembuh juga terus meningkat di antara tingginya kasus positif dan kematian. Hingga bulan Juni 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu tahun. Data perkembangan kasus Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan. Jumlah

kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 adalah sebagai berikut: Sabtu (31/7): Kasus positif Covid-19 bertambah 37.284 menjadi 3.409.658 kasus. Pasien sembuh bertambah 39.372 menjadi 2.770.092 orang. Pasien meninggal bertambah 1.808 menjadi 94.119 orang. Pemerintah RI berusaha terus agar seluruh rakyat dapat mengikuti program vaksinasi nasional dan tetap menjalankan protokol Kesehatan dengan menerapkan aturan 5 M : Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas.

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat sehingga masyarakat menjauhi kerumunan adalah dengan menerapkan kebijakan larangan mudik. Seperti yang diketahui, bahwa mudik merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang lazimnya dilakukan saat momen hari raya Idul Fitri. Dimana mudik adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kata Mudik dari Bahasa Jawa, “*Mulih Dilik*” yang memiliki arti pulang sebentar. Mudik, pulang kampung, kemudian dianggap sebagai upaya untuk kembali ke asal-usulnya. Mereka ingin berjumpa dengan orangtua, handai taulan, dan melihat tempat di mana mereka tumbuh. Dengan pulang ke kampung, manusia akan teringat ‘kampung yang kekal’ atau akan ingat masa lalu ‘siapa yang menciptakan’ dan ‘akan ke mana setelah itu’. Secara simbolis, mudik adalah dinilai mampu mengingatkan manusia untuk kembali ke asalnya, atau kembali ke fitrah. (Muhammad Idris, 2021)

Dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat secara luas, Beragam kebijakan telah diberlakukan pemerintah dengan harapan dapat mencegah penyebaran virus ini, termasuk diresmikannya kebijakan larangan mudik yang dalam pelaksanaannya tidak memperbolehkan seluruh moda transportasi beroperasi dari tanggal 6-17 Mei 2021 mendatang. Berbeda dengan implementasi larangan mudik tahun 2020 lalu, pemerintah kini lebih tegas dalam mencegah mobilitas masyarakat dengan mengawasi titik-titik yang dinilai ramai dilalui oleh pemudik. Bahkan, diterapkan pula sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar kebijakan ini, seperti memerintahkan kendaraan yang hendak mudik untuk putar balik atau kembali ke daerah asal maupun sanksi lain sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pada mulanya, Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan pernah menyatakan bahwa pemerintah memperbolehkan masyarakat melakukan mudik lebaran di tahun ini yang disampaikannya pada hari Selasa 16 Maret 2021, ketika melaksanakan rapat kerja bersama Komisi V DPR. Namun, pemerintah kemudian mengganti kebijakan ini dengan melarang masyarakat yang berniat pulang kampung dengan alasan khawatir jika mobilitas masyarakat tersebut dapat meningkatkan kembali kasus covid-19 di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan inkonsistensinya dalam menetapkan kebijakan larangan mudik. Seorang pakar epidemiologi, Masdalina Pane mengutarakan bahwa inkonsistensi pemerintah juga turut menjadi penyebab mengapa kepatuhan masyarakat dalam menaati kebijakan ini tidak bisa dijamin. Bahkan, ada kemungkinan masyarakat justru menyepelkan

kebijakan yang sudah diresmikan tersebut (Putri Natasya Viresta, 2021). Hal ini pun menjadi perbincangan yang ramai di media online di tanah air. Masyarakat mempertanyakan kebijakan yang dirasakan memberangus “hak” individu untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

Berita dan informasi yang beredar di media online dan media social pun beragam. Hal ini menimbulkan pro dan kontra diantara netizen atau warganet di Indonesia. Jika merujuk pada data Hootsuite (We Are Social) pada bulan Januari 2020 yang menunjukkan bahwa pengguna media online di Indonesia adalah sebanyak 175,4 juta jiwa. Hal ini setara dengan 64 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, yakni sebanyak 272 juta jiwa (Kemp, 2020). Dapat disimpulkan, sebanyak lebih dari setengah populasi Indonesia menggunakan media *online* dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran informasi melalui media online membuat masyarakat mengetahui fenomena yang terjadi di dunia secara efektif dan efisien. Apalagi, keunggulan media online yang dapat menampilkan berita dalam format teks, foto maupun video menjadi salah satu daya tarik pembaca. Hal ini turut memengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan berita yang mulai bergeser dari media cetak dan atau media elektronik ke media *online*.

Fenomena tersebut seimbang dengan pemaparan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang menjelaskan total media massa diperkirakan mencapai 47.000, sebanyak 43.300 jenis media online, 200-300an jenis media cetak, dan sisanya adalah jenis media elektronik yang ada di Indonesia pada tahun 2018 (Humaniora, 2019). Perkembangan industri media *online* yang terus-menerus terjadi menyebabkan setiap perusahaan media *online* berlomba-lomba untuk memproduksi berita yang terbaik. Apalagi jika ada hal yang menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat, tentu menjadi berita yang menarik yang membuat media massa cenderung memiliki agenda tersendiri untuk menggiring opini pembaca atau netizen.

Saat jurnalis melakukan proses produksi berita, dilakukan melalui tahap framing dan agenda-setting. Merujuk pada pandangan Robert N. Entman (dikutip dari Eriyanto, 2012, h.79)

“*framing* adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain.” Sedangkan, agenda-setting adalah “proses kolektif dimana, media, pemerintah, dan publik saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan isu-isu apa yang dianggap penting” (Severin dan Tankard, 2005, h.274).

Penelitian yang dilakukan ini melihat bagaimana media online TEMPO.co dan Kompas.com membingkai berita terkait larangan mudik 2021, yang tertuang didalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Kebijakan itu diperketat dengan dikeluarkannya Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut. Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, Jenis data Deskriptif, menggunakan Metode Analisis Framing Robert N. Entman, dimana proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga suatu bagian tertentu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Penempatan suatu informasi secara lebih khas sehingga sisi tersebut terekspos lebih besar dibanding sisi yang lain. Objek Penelitian adalah berita terkait Larangan Mudik 2021 di media media kompas.com dan TEMPO.co, tanggal 25 April – 25 Mei 2021 (1 bulan).

Konsep *framing* dari Robert N Entman ini menyebutkan bahwa ada dua aspek penting yang harus diperhatikan ketika membingkai berita. Yang pertama adalah memilih fakta atau realitas. Proses ini dilakukan berdasarkan asumsi dan perspektif yang dimiliki oleh wartawan. Terdapat dua kemungkinan dalam aspek ini, yaitu: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang tidak dipilih (*excluded*). Adanya dua kemungkinan ini berbicara tentang penekanan pada sisi tertentu suatu berita. Apabila penekanan terjadi pada sisi tertentu, maka sisi yang lain biasanya cenderung dilupakan atau diabaikan. Pemahaman setiap media dapat berbeda, tergantung dari sisi mana pemberitaan ditonjolkan. Aspek kedua adalah menuliskan fakta. Aspek kedua ini dijalankan setelah aspek pertama dilakukan. Menuliskan fakta berbicara tentang bagaimana fakta atau realitas yang dipilih, kemudian disampaikan kepada khalayak. Penyajian ini sangatlah penting karena membutuhkan penggabungan dari berbagai elemen seperti penggunaan kata hingga kalimat, pemilihan headline, penambahan foto dan gambar dalam berita. Penggabungan elemen ini harus tepat agar dapat menunjukkan penonjolan suatu fakta/realitas di dalam berita (Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, 2015)

Tabel 1 Model Framing Robert N Entman

<i>Define Problems</i> (Mendefinisikan masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Menelaah sumber masalah)	Apa penyebab masalah pada peristiwa itu terjadi? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Apa nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk meligitmasi atau mendeligitmasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendations</i> (Rekomendasi penyelesaian)	Apa bentuk penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut? Cara apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber : Eriyanto, 2015

Dalam menulis pemberitaan, aspek yang perlu diperhatikan adalah nilai berita. Ada 11 nilai berita yang ikut menjadi bagian dalam penonjolan suatu fakta atau realitas yang ingin ditampilkan oleh wartawan. Diantaranya adalah;

1. *Prominance* (Keunggulan) Nilai berita diukur dari seberapa besar dan

penting peristiwa yang diangkat.

2. *Human Interest* (Unsur kemanusiaan) Peristiwa semakin memiliki nilai berita jika peristiwa tersebut mengandung unsur kemanusiaannya.

3. *Conflict/Controversy* (Konflik) Peristiwa mengandung konflik yang cenderung kontroversial.

4. *Unusualness* (Keluarbiasaan) Berita mengandung peristiwa yang tidak biasanya/jarang terjadi.

5. *Proximity* (Kedekatan) Peristiwa yang diangkat menjadi berita memiliki kedekatan secara fisik maupun emosional khalayak.

6. *Newness* (Kebaharuan) Adanya nilai kebaruan pada peristiwa yang terjadi dan diangkat menjadi berita.

7. *Impact* (Akibat) Bila suatu peristiwa menimbulkan dampak bagi pihak-pihak maka dapat memiliki nilai berita.

8. *Information* (Informasi) Berita harus memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi publik sehingga menciptakan perhatian.

9. *Timeliness* (Aktual) Peristiwa yang diliput sebagai berita harus sedang benar-benar terjadi agar dapat bernilai aktual.

10. *Surprising* (Kejutan) Sebuah kejutan datang secara tiba-tiba, nilai inilah yang memberikan nilai pada sebuah pemberitaan (Eriyanto, 2015)

Dalam penelitian ini, hasil penelitian diperoleh dari berita-berita yang dikumpulkan yang memiliki tone pemberitaan yang sama terkait larangan mudik 2021.

Contoh dari analisis berita yang dilakukan antara lain;



Gambar 1. Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor

Sumber : TEMPO.co

18,9 Juta Orang Berencana Mudik, Ini Pesan Jokowi untuk Kepala Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah terus mengingatkan warganya agar tidak mudik Lebaran 2021. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak tujuh persen masyarakat tetap

berencana mudik atau pulang kampung.

“Tujuh persen ini masih besar, 18,9 juta orang,” ujar Jokowi lewat akun Instagram @jokowi, Jumat, 30 April 2021.

Jokowi menyebut, sebelum ada larangan mudik, data masyarakat yang ingin mudik sebanyak 89 juta orang atau kurang lebih 33 persen dari penduduk Indonesia. Begitu ada larangan mudik turun menjadi 11 persen dan angkanya masih 29 juta.

Setelah sosialisasi pemerintah pusat bersama para kepala daerah menyampaikan mengenai larangan mudik, angkanya turun menjadi 7 persen. “Jadi, saya meminta para kepala daerah untuk terus-menerus menyampaikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” tuturnya. Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara belakangan ini, lanjut Jokowi, harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk waspada. “Kepada seluruh kepala daerah saya sampaikan jangan pernah lengah, sekecil apapun kasus aktif di satu provinsi, kabupaten, atau kota,” ujar Jokowi.

Larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021. Pada momentum Idul Fitri tahun ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyarankan warga bersilaturahmi secara virtual menggunakan teknologi.

“Mohon berkenan posko-posko yang ada di setiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi,” ujar Doni soal kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Berdasarkan berita tersebut, peneliti kemudian melakukan identifikasi berita berdasarkan model Robert N Entman, sebagai berikut :

1. Media TEMPO.co :

TANGGAL	HEADLINE
25 April 2021	Larangan Mudik, Satgas Kabupaten Bogor Kerahkan 504 Personel Gabungan di 7 Titik
27 April 2021	Cegah Demo Larangan Mudik, Polsek Cileungsi Undang Sopir dan Pengusaha PO Bus
27 April 2021	Larangan Mudik, Polisi Awasi Tawaran Travel Gelap di Media Sosial
30 April 2021	Larangan Mudik, Jawa Barat Siapkan 120 Titik Penyekatan Termasuk Jalan Tikus
30 April 2021	Larangan Mudik Lebaran, PO Bus AKAP: Masih Layani Penumpang
2 Mei 2021	Larangan Mudik, Polisi Tahan dan Tilang 15 Kendaraan Travel

3 Mei 2021	Pelanggar Larangan Mudik Lebaran Diancam Putar Balik hingga Pidana
4 Mei 2021	Larangan Mudik 2021: Pemudik Dengan Sepeda Motor Padati Jalur Pantura
4 Mei 2021	Jakarta Terkini: KPAI Soroti Mudik Lebaran, Viral Toko Thamrin City Membeludak
5 Mei 2021	Larangan Mudik Berlaku Esok, Ingat Hanya Kelompok Ini yang Boleh Bepergian
5 Mei 2021	Larangan Mudik, Jalan Layang Tol MBZ Ditutup Mulai Dini Hari Nanti hingga 18 Mei
6 Mei 2021	171 WNA Asal Cina Berdatangan via Bandara Soekarno-Hatta Saat Larangan Mudik
7 Mei 2021	Akhirnya Pemprov DKI Juga Larang Warga Mudik di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek
8 Mei 2021	Sebar Ajakan Tolak Larangan Mudik, Tiga Orang Ditangkap Polisi
9 Mei 2021	Terobos Larangan Mudik Lebaran 2021, Pemudik Masuk Truk Motor sampai Ambulans
12 Mei 2021	Larangan Mudik, Puan Maharani dan Kapolri Akan Tinjau Bandara Soekarno-Hatta
12 Mei 2021	Larangan Mudik, Terminal Kampung Rambutan Juga Siap Protokol Kesehatan Ketat
12 Mei 2021	Pemerintah Akui Kebijakan Larangan Mudik Belum Sempurna, Tetapi...
15 Mei 2021	Larangan Mudik, Polri Telah Putar Balik 600 Ribu Kendaraan Pemudik
15 Mei 2021	Langgar Larangan Mudik, 18 Ribu Kendaraan Diputar Balik
17 Mei 2021	Hari Terakhir Larangan Mudik, Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Diperketat
20 Mei 2021	Periode Larangan Mudik, Bandara Ngurah Rai alih Layani 12.896 Penumpang
21 Mei 2021	Polisi Sebut Pelanggar Larangan Mudik Dominan Lewat Jalur Tikus

Contoh dari analisis berita yang dilakukan antara lain;

18,9 Juta Orang Berencana Mudik, Ini Pesan Jokowi untuk Kepala Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah terus mengingatkan warganya agar tidak mudik Lebaran 2021. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak tujuh persen masyarakat tetap berencana mudik atau pulang kampung.

“Tujuh persen ini masih besar, 18,9 juta orang,” ujar Jokowi lewat akun Instagram @jokowi, Jumat, 30 April 2021.

Jokowi menyebut, sebelum ada larangan mudik, data masyarakat yang ingin mudik sebanyak 89 juta orang atau kurang lebih 33 persen dari penduduk Indonesia. Begitu ada larangan mudik turun menjadi 11 persen dan angkanya masih 29 juta.

Setelah sosialisasi pemerintah pusat bersama para kepala daerah menyampaikan mengenai larangan mudik, angkanya turun menjadi 7 persen. “Jadi, saya meminta para kepala daerah untuk terus-menerus menyampaikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” tuturnya. Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara belakangan ini, lanjut Jokowi, harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk waspada. “Kepada seluruh kepala daerah saya sampaikan jangan pernah lengah, sekecil apapun kasus aktif di satu provinsi, kabupaten, atau kota,” ujar Jokowi.

Larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021. Pada momentum Idul Fitri tahun ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyarankan warga bersilaturahmi secara virtual menggunakan teknologi.

“Mohon berkenan posko-posko yang ada di setiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi,” ujar Doni soal kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Berdasarkan berita tersebut, peneliti kemudian melakukan identifikasi berita berdasarkan model Robert N Entman, sebagai berikut :

Tabel 2. Implementas Model Robert N Entman pada TEMPO.CO

Define Problems (Mendefinisikan masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah terus mengingatkan warganya agar tidak mudik Lebaran 2021
Diagnose Causes (Meneleah sumber masalah)	Apa penyebab masalah pada peristiwa itu terjadi? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah? Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak tujuh persen masyarakat tetap berencana mudik atau pulang kampung.”Tujuh persen ini masih besar, 18,9 juta orang”

<p>Make Moral Judgment (M e m b u a t keputusan moral)</p>	<p>Apa nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk meligitmasi atau mendeligitmasi suatu tindakan? “Jadi, saya meminta para kepala daerah untuk terus-menerus menyampaikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” tuturnya.</p>
<p>Treatment</p>	<p>Apa bentuk penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut? Cara apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah? Pada momentum Idul Fitri tahun ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyarankan warga bersilaturahmi secara virtual menggunakan teknologi. “Mohon berkenan posko-posko yang ada di setiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi,” ujar Doni soal kebijakan larangan mudik Lebaran 2021</p>



Gambar 2. Petugas melakukan penyekatan kendaraan di Rest Area KM 149 Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad, 16 Mei 2021

Sumber : TEMPO.co

Hari Terakhir Larangan Mudik, Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Diperketat

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini merupakan hari terakhir masa peniadaan mudik atau larangan mudik. Namun demikian, pemeriksaan dokumen kesehatan para pelaku perjalanan akan terus diperketat. Ketentuan syarat perjalanan penumpang dalam negeri kembali mengacu pada SE Satgas no 13.

“Hari ini kami bersama Satgas dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk terus memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan terhadap semua penumpang dan pengguna jalan di semua moda transportasi,” kata Budi Karya dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Mei 2021.

Hal ini mempertimbangkan masih besarnya potensi mobilitas yang dilakukan pasca tanggal 17 Mei 2021 khususnya yang berasal dari Sumatera dan Jawa Tengah,

Jawa Barat serta Jawa Timur yang masuk ke Jawa/Jabodetabek.

Pelaku perjalanan udara, laut, kereta api dan penyeberangan wajib menunjukkan dokumen negatif Covid-19 yang berlaku 1x24 jam.

Sedangkan untuk pelaku perjalanan darat baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi (roda empat dan roda dua), pelaksanaan tes acak Rapid Antigen akan diperpanjang khususnya di jalan nasional menuju Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi lonjakan kasus positif Covid-19 sebagai dampak perjalanan paska lebaran yang masih akan berlangsung dalam seminggu ke depan. Menhub Budi Karya juga meminta kepada seluruh stakeholders transportasi agar memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik pada fasilitas publik seperti terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Jumlah petugas maupun intensitas pengawasannya juga harus ditingkatkan.

Sementara itu terkait dengan pelaksanaan peniadaan/larangan mudik (6-17 Mei 2021), hingga tanggal 15 Mei 2021, secara umum terjadi penurunan mobilitas penumpang di semua moda hingga 84 persen. Penurunan tertinggi terjadi di transportasi udara yang secara akumulasi pada pelarangan 6-15 Mei 2021 rata-rata penumpang harian turun hingga 93 persen dibandingkan hari biasa pada April 2021.

Sedangkan transportasi untuk logistik tidak ada penurunan, bahkan terdapat beberapa peningkatan.

Meskipun terjadi penurunan volume penumpang secara signifikan, kata dia, tetap perlu diwaspadai aktivitas perjalanan masyarakat di pasca masa peniadaan mudik, tepatnya di tanggal 18-24 Mei 2021. Dengan meningkatnya kasus positif di Sumatera dalam beberapa minggu terakhir, maka perlu dilakukan pengetatan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni.

Sejak 15 Mei 2021 telah diberlakukan ketentuan wajib membawa hasil tes rapid antigen. Penumpang diminta melakukan tes secara mandiri lebih awal di daerah asalnya untuk menghindari penumpukan di pelabuhan.

Dengan adanya pengetatan pemeriksaan ini diharapkan masyarakat yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang terindikasi kenaikan kasus covid, tidak berpotensi mengakibatkan penularan.

Tabel 3. Implementas Model Robert N Entman pada TEMPO.CO

<p><i>Define Problems</i> (Mendefinisikan masalah)</p>	<p>Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Penyekatan dan pemeriksaan dilakukan terhadap pengendara berplat nomor luar Bandung yang menuju ke Bandung atau Jabodetabek guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat arus balik Idul Fitri 1442 Hijriah.</p>
--	---

<i>Diagnose Causes</i> (Menelaah sumber masalah)	Apa penyebab masalah pada peristiwa itu terjadi? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah? Tidak disebutkan secara jelas di dalam berita hanya diasumsikan oleh pembaca bahwa ada pemudik yang akan Kembali karena itu perluantisipasi lonjakan kasus
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Apa nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk meligitmasi atau mendeligitmasi suatu tindakan? Menhub Budi Karya juga meminta kepada seluruh stakeholders transportasi agar memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik pada fasilitas publik seperti terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Jumlah petugas maupun intensitas pengawasannya juga harus ditingkatkan
<i>Treatment Recommendations</i> (Rekomendasi penyelesaian)	Apa bentuk penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut? Cara apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah? Penumpang diminta melakukan tes secara mandiri lebih awal di daerah asalnya untuk menghindari penumpukan di pelabuhan. Dengan adanya pengetatan pemeriksaan ini diharapkan masyarakat yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang terindikasi kenaikan kasus covid, tidak berpotensi mengakibatkan penularan.

2. Media: KOMPAS.COM

TANGGAL	HEADLINE
25 April 2021	Simak Tanggal Larangan Mudik Lebaran 2021
26 April 2021	Berlaku Larangan Mudik dan Pengetatan Perjalanan Lebaran 2021, Ini yang Harus Diketahui
29 April 2021	Larangan Mudik, Pos Penyekatan Mulai Beroperasi di Bundaran Waru Surabaya
30 April 2021	Aturan Wisata Selama Masa Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021...
2 Mei 2021	Simak Lagi Persyaratan Perjalanan Jelang Periode Larangan Mudik 2021
3 Mei 2021	Dimulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021
4 Mei 2021	5 Alasan Pemerintah Terbitkan Larangan Mudik Lebaran Mei 2021

Dies Natalis ke 26 FISIP UPH, 21 Agustus 1995 - 2021

5 Mei 2021	Berlaku Besok, Ini Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei
6 Mei 2021	Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Ma-cam-macam
7 Mei 2021	Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup
8 Mei 2021	Rincian Peraturan Larangan Mudik 2021 dan Sanksinya yang Dimulai 6 Mei 2021
9 Mei 2021	Hari Ketiga Larangan Mudik, 70.000 Kendaraan Dipaksa Putar Balik
10 Mei 2021	Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil
11 Mei 2021	Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...
12 Mei 2021	Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...
13 Mei 2021	Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku Hingga 17 Mei 2021
15 Mei 2021	Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat
16 Mei 2021	Aturan Lengkap Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mu-dik 18-24 Mei 2021
17 Mei 2021	Larangan Mudik Selesai, Menhub Pastikan Tetap Ada Penge-tatan Perjalanan
18 Mei 2021	Berlaku 18-24 Mei, Ini Syarat Perjalanan Pengetatan Pasca-la-rangan Mudik Lebaran
19 Mei 2021	Larangan Mudik Berakhir, Terminal Kalideres Dipadati Warga yang Hendak Pulang Kampung
25 Mei 2021	Pergerakan Penumpang Turun Selama Larangan Mudik, Ke-menhub: Masyarakat Sadar...

Contoh berita yang diteliti



Gambar 3
Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik
hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup
Sumber : Kompas.com (7 Mei 2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan mudik Lebaran 2021 yang ditetapkan pemerintah sudah mulai diberlakukan sejak Kamis (6/5/2021).

Menyikapi larangan mudik itu, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menyiapkan 31 lokasi penyekatan di Jabodetabek guna mengantisipasi pelaku perjalanan darat yang masih nekat meninggalkan domisili masing-masing selama periode larangan 6-17 Mei 2021.

Sebanyak 1.313 personel pun dikerahkan untuk berjaga-jaga di 17 check point dan 14 lokasi penyekatan. Berikut rangkuman kisah di balik hari pertama pelaksanaan larangan mudik di titik-titik penyekatan di Jabodetabek.

Ribuan kendaraan diputar balik Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, ribuan kendaraan terjaring penyekatan pada hari pertama pelaksanaan larangan mudik.

Sebanyak 1.070 kendaraan terjaring di Gerbang Tol (GT) Cikarang Barat dan Cikupa di terhitung sejak Kamis dini hari sampai pukul 12.00 WIB.

“Sejak pukul 00.00 WIB sampai pukul 12 siang tadi, total sudah ada 1.070 kendaraan yang diputarbalikkan. Ini diperkirakan masih berlanjut terus,” kata Yusri kepada wartawan, Kamis.

Adapun jenis kendaraan yang diputar balik terdiri dari 895 kendaraan pribadi dan 175 unit transportasi umum. “Ini masih berjalan karena 24 jam terus bergerak,” jelas Yusri.

Sementara itu, ratusan kendaraan yang melintas di enam titik pos penyekatan di Kota Bogor juga harus diputar balik oleh petugas kemarin. Sebanyak 172 kendaraan harus diputar balik tersebut terdiri dari 35 kendaraan roda dua dan 137 roda empat.

Kepala Kepolisian Resort Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, ratusan kendaraan itu diputar balik karena melanggar wilayah

aglomerasi berdasarkan aturan larangan mudik.

Kendaraan-kendaraan tersebut datang dari wilayah Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat. “Diputar balik karena sudah ada aglomerasi ya, wilayah Jabodetabek. Sehingga di luar itu (Jabodetabek) kita putar balik,” urai Susatyo. “Jadi yang terbanyak itu dari Sukabumi dan Cianjur. Karena di luar wilayah aglomerasi maka kita putar balik,” sambungnya.

Puluhan kendaraan juga terjaring di pos penyekatan di GT Bitung, Kabupaten Tangerang kemarin. Kasatlantas Polres Tangerang Selatan AKP Bayu Marfiando menjelaskan, lebih dari 50 kendaraan yang terindikasi akan mudik diminta putar balik oleh petugas gabungan hingga Kamis Sore.

“Yang diminta putar balik data sementara ini sudah ada lebih dari 50 kendaraan, kami akan cek lagi,” ujar Bayu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Tabel 4. Implementasi Model Robert N Entman pada Kompas.com

<i>Define Problems</i> (Mendefinisikan masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup Yang diminta putar balik data sementara ini sudah ada lebih dari 50 kendaraan
<i>Diagnose Causes</i> (Menelaah sumber masalah)	Apa penyebab masalah pada peristiwa itu terjadi? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah? ribuan kendaraan terjaring penyekatan pada hari pertama pelaksanaan larangan mudik.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Apa nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk meligitmasi atau mendeligitmasi suatu tindakan? Yang diminta putar balik data sementara ini sudah ada lebih dari 50 kendaraan
<i>Treatment Recommendations</i> (Rekomendasi penyelesaian)	Apa bentuk penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut? Cara apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah? Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik

TEMUAN PENELITIAN

Dari hasil analisis secara garis besar peneliti menemukan beberapa hal, antara lain;

a. *Headline*

Temuan peneliti bahwa dari segi judul atau *headline* dalam pemberitaan, Media *Online* TEMPO.co cenderung menonjolkan *headline* yang lebih umum.

Artinya kondisi kondisi saat larangan mudik di beberapa wilayah atau tempat : Larangan Mudik, Satgas Kabupaten Bogor Kerahkan 504 Personel Gabungan di 7 Titik, Periode Larangan Mudik, Bandara Ngurah Rai Bali Layani 12.896 Penumpang, Larangan Mudik 2021: Pemudik Dengan Sepeda Motor Padati Jalur Pantura. Selain itu pada *headline* juga dimunculkan beberapa kali kata polisi, putar balik, ancaman tindak pidana, tindak tegas. Sehingga ada kesan bahwa yang ditonjolkan pada masyarakat adalah menggugah kesadaran mereka mengenai bahaya dan sanksi jika melanggar kebijakan atau aturan mudik yang disebut juga sebagai larangan mudik. Sedangkan bagi Kompas.com lebih menonjolkan data dan informasi seputar aturan aturan larangan mudik, Contoh nya sebagai berikut; Dimulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021, 5 Alasan Pemerintah Terbitkan Larangan Mudik Lebaran Mei 2021, Berlaku Besok, Ini Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei, Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat, Aturan Lengkap Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik 18-24 Mei 2021. Hal ini terlihat dari tidak ada sama sekali kata Polisi, tindak tegas, ancaman pidana yang ditonjolkan oleh Kompas.com pada headlinenya. Ada kesan bahwa secara keseluruhan dari headline Kompas.com hendak menggiring opini publik untuk mengetahui informasi umum saja mengenai aturan larangan mudik ini. Akibatnya terlihat bahwa informasi publik yang penting ini hanya seperti informasi biasa lainnya, yang dapat diabaikan oleh publik. Kemungkinan besar hal ini dilakukan oleh Kompas untuk menghindari *headline* yang terlalu bombastis atau melebihi lebihkan dan memilih untuk headline sesuai dengan porsi pemberitaan saja. Tetapi dalam setiap pemberitaan tentu ada penonjolan informasi, yang mana dapat menguatkan publik untuk mengambil sikap atau langkah mengikuti ketentuan pemerintah jika hal ini menyangkut kepentingan umum.

2. Konten Pemberitaan

Kedua media online ini tidak menggunakan kata kata yang membesar besarkan informasi dan menggiring orang kontra terhadap larangan mudik 2021 ini. Menariknya walaupun kedua media *online* ini merupakan media yang dipercaya berisi dan padat serta terpercaya dalam menyampaikan pemberitaannya, akan tetapi masih ditemukan beberapa berita yang isi didalamnya tidak menggambarkan dengan jelas permasalahan sebenarnya apa. Hal ini cukup menguatirkan mengingat masih banyak orang yang tidak membaca berita secara keseluruhan. Masih banyak masyarakat yang belum terliterasi secara baik. Masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menuntaskan Indonesia agar makin cakap digital. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah publik yang masih membaca berita hanya pada halaman 1 atau 2 saja, tidak lanjut ke halaman berikutnya sampai selesai. Akibatnya misinformasi terjadi yang berujung pada penyebaran berita bohong atau hoax maupun ujaran kebencian (*hate speech*) yang umumnya terjadi karena ketidak tahuan masyarakat betapa pentingnya cakap berliterasi secara digital. Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy* (1997),

literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Hal ini berarti bahwa kemampuan literasi digital ini harus diupayakan menjangkau seluruh kapisan masyarakat. Terutama pada saat pandemic covid-19 seperti saat ini. Dimana semua orang belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah. Mengakibatkan waktu mengakses internet menjadi lebih banyak lagi. Hal ini ditambah dengan Kebiasaan membaca masyarakat modern adalah jarang membaca tidak lebih dari headlinenya saja. Masalahnya, terkadang berita yang dimuat adalah laporan yang disederhanakan, mengingat space yang terbatas. Terlebih lagi jika hanya melihat sekilas berita tersebut di media online, maka laporan tersebut terpotong menjadi lebih sedikit lagi dan bukanlah berita yang lengkap dan seutuhnya. Hal ini berbeda dari media cetak konvensional KOMPAS dan TEMPO yang mempunyai reputasi pemberitaan yang baik dan terpercaya di masyarakat. Dimana setiap ulasan cenderung disajikan dengan lengkap. Hal yang terjadi sebaliknya di media online, untuk konten, kedua media online ini baik Kompas.com maupun TEMPO.co seharusnya fokus pada solusi.

3. Agenda Media

Tidak terlihat agenda tertentu yang diusung oleh kedua media *online* ini. Pemberitaan kedua media ini sama sama tersebar, artinya tidak focus pada 1 *issue* utama, misalnya kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan sebagainya. Di kedua media, Narasumber masih disebutkan secara jelas beserta dengan kutipan kata tanya nya, jadi tidak memakai justifikasi dari wartawan. Kemudian, di hampir semua pemberitaan terdapat data yang di peroleh dilapangan tapi tidak dikonfirmasi lagi (misalnya wawancara dengan pemudik, wawancara dengan aparat kepolisian dan sebagainya). Isi atau konten pemberitaan lebih banyak mengangkat data jumlah kendaraan, jumlah personil, jumlah titik penyekatan, jam dan lain lain tetapi cerita dibalik itu tidak diangkat, hal ini tidak efektif menyebabkan pembaca tidak akan memperhatikan data dan angka tersebut. Apalagi untuk media *online* yang memiliki beberapa halaman dan setiap halaman memuat banyak sekali iklan.

4. Nilai Berita

Untuk nilai berita, kedua media sama sama memuat unsur *Proximity* (Kedekatan) Peristiwa yang diangkat menjadi berita memiliki kedekatan secara fisik maupun emosional khalayak. *Newness* (Kebaharuan) Adanya nilai kebaruan pada peristiwa yang terjadi dan diangkat menjadi berita, *Impact* (Akibat) Bila suatu peristiwa menimbulkan dampak bagi pihak-pihak maka dapat memiliki nilai berita. *Information* (Informasi) Berita harus memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi publik sehingga menciptakan perhatian. *Timeliness* (Aktual) Peristiwa yang diliput sebagai berita harus sedang benar-benar terjadi agar dapat bernilai aktual. Menariknya, di kedua media ini hampir tidak ada opini pribadi penulis berita

yang masuk dalam berita ini, kemudian terdapat foto dokumentasi kegiatan dan Infografis sangat membantu memudahkan pembaca memahami isi berita dan informasi yang baru. Selain hal positif yang ditemukan, peneliti juga menemukan bahwa pembaca/ warganet harus tetap berhati-hati karena Judul dan isi masih ditemukan ada yang tidak sinkron satu sama lainnya. Selain itu berita atau konten untuk media TEMPO.co Sebagian ada yang diambil dari ANTARA news. Yang terakhir, ditemukan bahwa belum ada unsur edukasi dalam pemberitaan masih sebatas pemaparan atau hasil dari wawancara dengan narasumber dan temuan di lapangan.

Kesimpulan

Salam penelitian ini komunikasi publik identik dengan penggunaan media massa. Pada era digital ini, komunikasi publik memiliki banyak alternatif medium yang dapat menjangkau masyarakat, baik secara massal maupun personal. Publik, netizen, warganet tidaklah pasif namun semakin kritis dalam melihat kinerja dan tanggung jawab organisasi. Karena itu media online dituntut makin proaktif dalam berkomunikasi dengan publik. TEMPO.co dan Kompas.com telah melakukan upaya untuk menyampaikan informasi pemerintah dengan tidak melebihi lebihkan informasi. Tetapi belum *cover both sides*, artinya informasi masih satu arah belum ada informasi dari para calon pemudik ataupun tokoh masyarakat, pengamat dan sebagainya masuk dalam pemberitaan. Terkesan ini informasi yang hanya sekedar informasi saja, bisa dilakukan bisa tidak dilakukan. Tidak heran jika banyak orang yang tetap saja melanggar aturan mudik karena sisi penting dari unsur pemberitaan 5 W 1 H yakni WHY dan HOW dalam pemberitaan Larangan mudik 2021 ini tidak di elaborasi lebih jauh lagi. Sehingga publik menjadi bias. Pesan pemerintah pun tidak tersampaikan dengan baik.

Penonjolan info penting masih sebatas pada tanggal tanggal penting larangan mudik. Bukan pada konsekuensi jika publik melanggar aturan tersebut, atau bukan pada mengajak publik untuk melihat hal ini dari sisi penyebaran *pandemic covid-19* yang masih sangat tinggi pada saat itu. Hal ini terjadi karena ada bagian yang hilang yaitu informasi disajikan tanpa unsur edukasi yang sebenarnya dapat dilakukan dengan pemilihan diksi atau kata yang berkonotasi mengajak masyarakat agar melihat persoalan MUDIK sebagai persoalan bersama bukan sebagai sekedar suatu larangan sepihak saja dari pemerintah. Apalagi pada saat ini komunikasi publik menghadapi persoalan terkait peredaran misinformasi yang berpotensi mendistorsi kepercayaan dan kredibilitas informasi dari sumber-sumber informasi resmi. Sementara kapasitas literasi digital masyarakat masih terbatas, untuk dapat bertindak kritis terhadap pesan. Padahal pada era digital seperti saat ini media online menempati posisi sangat penting dimasyarakat, yang dibaca lintas generasi. Akan tetapi media online masih perlu membenahi diri untuk lebih berkontribusi dalam penyebaran informasi yang mendidik dan mengubah publik menjadi lebih baik lagi. Media online harus menjadi agen perubah untuk membawa publik makin

sadar dan peduli serta bertanggungjawab dalam mengakses setiap informasi.

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk media *online* antara lain; Media online harus memperhatikan kesesuaian Judul dan Isi berita, Media online harus *cover both side* dengan melakukan wawancara juga dengan pemudik (misalnya), Perlu penonjolan berita yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang menjadi tujuan dari informasi publik ini tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Bukan sekedar memindahkan isi *Press Release* dari pemerintah ke dalam tulisan apalagi news / berita, Perlu memperhatikan aspek 5 W dan 1 H dalam penulisan artikel online. Perlu sarana komunikasi dan informasi yang lebih menasar milenials seperti melalui media Podcast, dan media social lainnya.

Sedangkan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan atau kebijakan atau aturan pada seluruh warga masyarakat antara lain; Belum ada informasi yang memiliki 1 tujuan / sasaran secara jelas dan terarah, Angle berita masih tersebar sehingga dapat membingungkan warganet / masyarakat, Tidak ada juru bicara / spokesperson yang tetap yang *intens* berbicara untuk publik terkait larangan mudik ini, berikutnya mengenai Kemitraan antara Pemerintah, gugus tugas, Polri, Kementerian Perhubungan, kementerian lainnya yang belum terlihat didalam pemberitaan. Terlalu banyak singkatan dan istilah baru yang digunakan selama *pandemic covid-19* ini yang berpotensi membingungkan publik seperti SIKM, PPKM Micro, PSBB, Aglomerasi dan lain sebagainya, apalagi media tidak menyebutkan atau menjelaskan arti pada setiap penyebutan akronim akronim tersebut.

Tahapan distribusi informasi pada publik melalui media, terlihat belum sinkron, masih ada info yang terputus dan informasi yang tidak dilanjutkan Kembali, misalnya mengenai denda atau sanksi yang diawal sebelum larangan mudik dikeluarkan ramai diberitakan. Kemudian *issus* itu hilang lagi. Selain itu, Kebijakan larangan mudik dirasakan tidak efektif (wawancara peneliti dengan beberapa informan) dan ada kesan buru buru dan tidak terkoordinir dengan baik antar Lembaga dan instansi yang berwenang termasuk dengan pemerintah daerah yang terakhir, pemerintah terlambat dalam memetakan problem di lapangan dan solusi.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). (E. T. Sofia, Terjemahan). Jakarta: PT Indeks.

Non Buku / Internet:

<https://www.kompasiana.com/natasyavirestaputri>

Buku Literasi Digital. <https://gln.kemdikbud.go.id>

DIGITAL 2021: INDONESIA, Simon Kemp. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

Kompas.com, April – Mei 2021

TEMPO.CO, April – Mei 2021

Biodata



Marsefio Sevyone Luhukay, S.Sos., M.Si

Senior Lecturer, Head of the Department of Communication Science, FISIP, Pelita Harapan University. She has a Master's Degree in Communication Science from Airlangga University. Her research interests are communications and culture, corporate communication, public relations, and media studies. Email : marsefio.luhukay@uph.edu